

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Abdurrachman. 1999. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta:
Pradyna Paramita.
- Agustina, Rani. 2017. *Rahasia Bank*. Bandung: Keni Media.
- Asofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Irhan. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU 10/2998) Buku
Kesatu*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ghazali, Djoni dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku
Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Husein, Yunus. 2010. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda
Tiga Lama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Imanayati, Neni Sri. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung: Fakultas Hukum Unisba.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di
Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret: Surakarta.

Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Neo, Dora dan Sandra Booyesen. 2017. *Can Banks Still Keep It Secret*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia: Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

Trisadini dan Shomad. 2015. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Gramedia.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 190);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6051);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1016);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771); dan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK/2017 Tentang

Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan
Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 837);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK/2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017
Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk
Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
281);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431); dan

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

Jurnal

Soeparomo, Heru. “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan”. *Jurnal Hukum
Bisnis*. Volume 1. Jakarta 1997.

Safira, Dyah. “Sistem Keterbukaan Informasi Global, Badan Perpajakan Internasional
dan Hubungannya dengan Panama Papers”. *Academia.Edu*. PKN STAN. 12
Februari 2018.

Surono, Hadi. “Selamat Datang Era Keterbukaan Informasi Keuangan”. *Media Keuangan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Vol. 12, Nomor 117. Juni 2017.

Vokhid Urinov. “Developing Country Perspective on Automatic Exchange of Information”. *Social Justice & Global Development Journal (LGD)*. Vol. 5. Oktober 2015.

Internet

Anonim. “DPR Setujui Perppu AEOI Menjadi Undang-Undang”. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-setujui-perppu-aeoi-menjadi-undang-undang/>. Diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 18.07 WIB.

Iskandar, Hendar. “Jangan Biarkan Ditjen Pajak Kembali Dianggap Gagal”. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/jangan-biarkan-ditjen-pajak-kembali-dianggap-gagal>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 14.50 WIB.

Wibisono, Aditya. “Awasi Potensi Pasca Amnesti Pajak Dengan AEOI”. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/awasi-potensi-pasca-amnesti-pajak-dengan-aeoi/>. Diakses pada tanggal 22 November 2020.